



LEMBARAN DAERAH

**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 1998 SERI B NOMOR SERI 1**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR 10 TAHUN 1998

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN
TENTANG RETRIBUSI DAERAH**



**PROYEK INVENTARISASI & KODIFIKASI HUKUM
PERATURAN DAERAH T. A. 1998 / 1999**



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN**

L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN
Nomor 7 Tahun 1998 Seri B No. Seri 1
=====

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR 10 TAHUN 1998

TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan yang menyangkut Retribusi Daerah yang tidak terkait dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan seperti yang disebutkan diatas perlu dicabut ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
 6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1998 tentang Larangan Pengenaan Pungutan atas Barang-barang Ekspor ;
 7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1998 tentang Perdagangan antar Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II/ Pulau :

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan ;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Larangan Pengenaan Pungutan atas Barang-barang Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II/ Pulau ;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN
TENTANG RETRIBUSI DAERAH.**

Pasal. 1

a. Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan tentang Retribusi Daerah yang terdiri dari :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Plat Nomor Perumahan ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1992 tentang Retribusi Uang Leges ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 1994 tentang Penggunaan Jalan Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 1996 tentang Izin Usaha Angkutan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

b. Ketentuan lain di dalam Peraturan Daerah sebagaimana tercantum didalam Pasal 1 huruf a yang tidak mengatur Retribusi, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan yang tidak termasuk dalam daftar sebagaimana huruf a yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku termasuk yang dicabut.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 1998.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 15 Agustus 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KAB. DATI II
HULU SUNGAI SELATAN
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
HULU SUNGAI SELATAN,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

H. MARZUQIE, BA

Drs. H SAIDUL HUDARIE

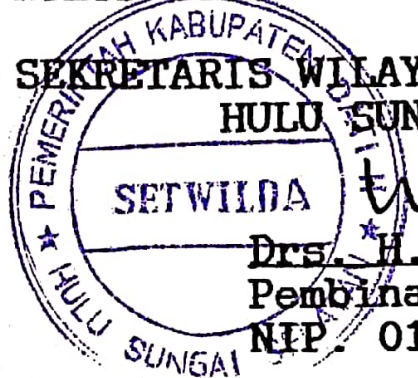
Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Kalimantan Selatan dengan
Surat Keputusan :

Nomor : 26/SK-1/KUM
Tanggal : 1 Desember 1998

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Hulu Sungai Selatan

Nomor : 7
Tanggal : 31 Desember 1998
Tahun : 1998
Seri : B
Nomor Seri : 1

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN,



[Signature]
Drs. H. M. YUNANIE
Pembina Tk. I
NIP. 010 045 594.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



[Signature]
ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002